

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYAKIT MASYARAKAT
PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD AXEL RADINDASYAH

2010010094

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYAKIT MASYARAKAT
PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANYUMAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Oleh :

MUHAMMAD AXEL RADINDASYAH

2010010094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Axel Radindasyah

NIM : 2010010094

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Penyakit Masyarakat Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SAPOL PP) Di Wilayah Hukum Kabupaten Banyumas**

Telah berhasil dipertanyakan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

DEWAN PENGUJI

Penguji 1 : Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M.

Penguji 2 : Dr. Susuto Wardani S.H., S.E., M.Hum.

Penguji 3 : Gamalel Rifqi Samhudi, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 31 Juli 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.

NIP: 196908201994032002



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Axel Radindasyah

NIM : 2010010094

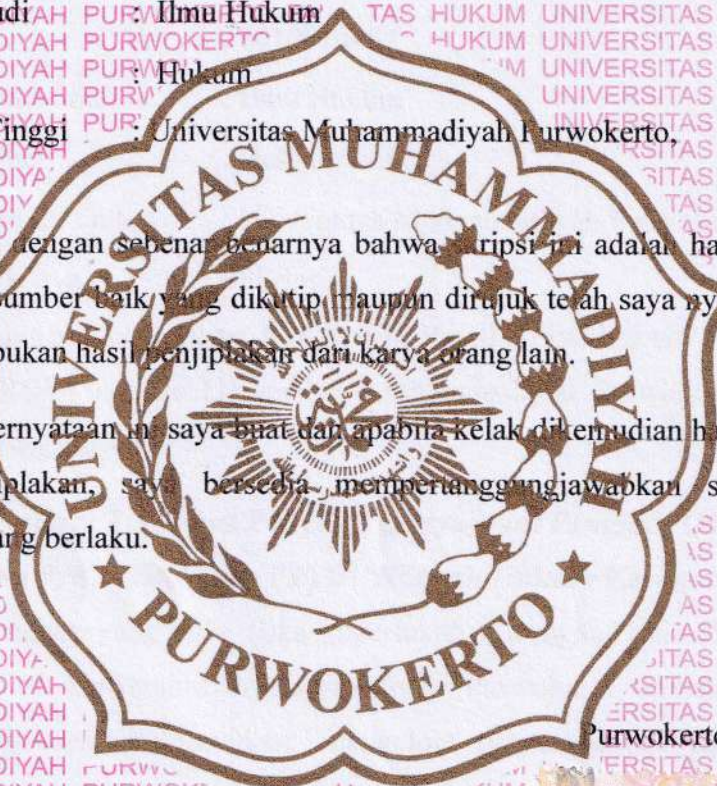
Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskahripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia mempenanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Purwokerto, 31 Juli 2025



Muhammad Axel R

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai individu akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Axel Radindasyah

NIM : 2010010094

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royal-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Penyakit Masyarakat Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Di Wilayah Hukum Kabupaten Banyumas.

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalihmedia/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Purwokerto

Pada Tanggal 31 Juli 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Axel R

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu.'" (QS. Thaha: 114)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11)

PERSEMBAHAN

★ Karya sederhana ini Penulis Persembahkan kepada :

1. Ibu dan Bapak Tercinta
2. Adik Tersayang
3. Teman-temanku semua

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyakit Masyarakat Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Di Wilayah Hukum Kabupaten Banyumas” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Assoc. Dr. Jebul Suroso, S.KP.,M.Kep., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Assoc. Dr. Indriati Amarini, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UMP dan sekaligus selaku Dewan Penguji yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Ika Ariani Kartini, S.H.,LL.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi kepada penulis, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu,
4. Dr Susilo Wardani, S.H.,S.E,M.Hum selaku Reviewer 1 yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya Penulisan Hukum ini.
5. Gamalel Rifqi Samhudi, S.H., M.H, selaku Reviewer 2 memberikan bimbingan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan Hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Staf karyawan Kampus Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Purwokerto yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Purwokerto.
8. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menyusun Penulisan Hukum ini.
9. Ayahku dan Ibuku yang sudah membiayai kuliah serta memberi kepercayaan, dukungan dan doa-doa yang tiada hentinya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan penulis dapat mengejar cita-cita demi masa depan.
10. Keluarga Besarku yang telah mendoakan dan mendukungku.
11. Sahabatku dan semua teman-teman telah memberi semangat dan dukungan.
12. Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan Penulisan Hukum, segala informasi dan kesetiiaannya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis akan sangat menghargai kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Penulisan Hukum (Skripsi) semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini bermanfaat bagi semua pihak

Purwokerto, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hasil Penelitian Terlebih Dahulu..... | 9 |
| B. Landasan teori..... | 12 |
| 1. Teori Penegakan Hukum | 12 |
| 2. Teori Keadilan..... | 15 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 17 |
| 1. Penegakan Hukum | 17 |
| 2. Penyakit Masyarakat..... | 19 |
| 3. Pengemis..... | 21 |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| 4. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)..... | 23 |
| D. Kerangka Berfikir | 25 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Metode Pendekatan | 26 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 26 |
| C. Materi Penelitian | 26 |
| D. Lokasi Penelitian..... | 26 |
| E. Sumber Data Penelitian | 26 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 27 |
| G. Metode Penyajian Data..... | 27 |
| H. Metode Analisis Data | 28 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A Hasil Penelitian | 29 |
| B. Pembahasan | 36 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYAKIT MASYARAKAT
PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANYUMAS**

Muhammad Axel Radindasyah, Ika Ariani Kartini, S.H., LLM

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas adalah melalui Tindakan preventif, dengan melalui cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan patroli. Tindakan secara represif melalui cara kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah, Usaha Rehabilitatif dan Bimbingan Lanjut, yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan fisik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas adalah Faktor Penegak Hukum, yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Faktor Sarana atau Fasilitas belum mencukupi untuk menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Faktor Masyarakat yaitu kurangnya dukungan oleh masyarakat hanya diam tanpa ada tindakan yang membantu mempermudah SATPOL PP dalam penanganan gelandangan dan pengemis, Faktor Kebudayaan yaitu Gaya hidup sebagian Gelandangan dan Pengemis itu menaruh harapan semu untuk mendapatkan uang besar hasil kegiatannya.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penyakit Masyarakat, Pengemis SATPOL PP.

*LAW ENFORCEMENT AGAINST THE SOCIAL DISEASE OF BEGGING
BY THE POLICE CIVIL SERVANT UNIT (SATPOL PP)
IN THE JURISDICTION OF BANYUMAS REGENCY*

Muhammad Axel Radindasyah, Ika Ariani Kartini, S.H., LLM

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is part of the regional apparatus responsible for enforcing regional regulations and maintaining public order and public safety. Law enforcement by the Satpol PP in dealing with vagrants and beggars in Banyumas Regency is carried out through preventive measures, such as providing public education and conducting patrols. Repressive measures are taken through judicial operations enforcing regional regulations, and Rehabilitative Efforts and Advanced Guidance, which include social services provided in the form of Social Guidance, Mental and Spiritual Guidance, Vocational Skills Guidance, and Physical Guidance. Obstacles faced in Law Enforcement in Handling Homelessness and Beggars in Banyumas Regency include: Law Enforcement Factors, namely the lack of facilities and infrastructure and human resources within the Civil Service Police Unit; Inadequate Facilities and Inadequate Support for the Banyumas Regency Civil Service Police Unit; Community Factors, namely the lack of public support, which results in the Satpol PP remaining silent without taking any action to facilitate the Satpol PP's handling of homelessness and beggars; and Cultural Factors, namely the lifestyles of some homeless and beggars, which place false hopes on earning large sums of money from their activities.

Keywords: Law Enforcement, Social Illnesses, Satpol PP Beggars.